

## Islam dan Ideologi Transnasional: Perspektif Al-Qur'an tentang Universalitas

Wachid Ridwan<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Paramadina Graduate School of Diplomacy (PGSD), Universitas Paramadina, Jakarta, Indonesia

### ARTICLE INFO:

#### Paper Type:

Research Paper

#### Keywords:

Transnasional, Universalitas, Ideologi, Westphalia

#### Article History

Received: 7 August 2025

Revised: 8 October 2025

Accepted: 5 January 2026

Available online: 4 March 2026

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

### ABSTRACT

Nilai-nilai universalitas ideologi agama dan konsep negara-bangsa sering sekali mendapatkan sebuah perdebatan tentang existensi keduanya. Gerakan transnasional yang terus mengikuti gejala globalisasi seolah mendapatkan wadah yang sesuai bagi penyebaran ideologinya. Sementara itu, konsep negara-bangsa yang sangat erat berkaitan dengan batas-batas teritorial negara dan kedaulatannya secara pasti mempunyai batas kewilayahan yang jelas. Wacana teori hubungan internasional yang membahas tentang kedaulatan dan universalitas seringkali mendapatkan irisan yang mudah dipertemukan akan tetapi sangat tidak memungkinkan untuk diterapkan pada kenyataan kehidupan berbangsa dan bernegara. Substansi dari universalitas ideologi agama dan konsep negara-bangsa tidak pernah akan menyatu dalam sebuah tata kelola pemerintahan suatu negara modern.

\*Corresponding author: [wachid.ridwan@paramadina.ac.id](mailto:wachid.ridwan@paramadina.ac.id)

Cite this article as: Ridwan, W. (2026) *Islam dan Ideologi Transnasional: Perspektif Al-Qur'an tentang Universalitas*. Paramadina Journal of Diplomacy & Foreign Policy, 02 (01), 43-51.  
<https://journal.paramadina.ac.id/index.php/diplomacyforeignpolicy>

### Pendahuluan

Apakah Islam, berdasarkan ajarannya yang melekat, selaras atau menyimpang dari ideologi transnasional seringkali menjadi perdebatan akademis. Menurut Myers (2006), perdebatan ini sangat penting karena ayat-ayat tertentu dalam Al-Qur'an mengungkapkan prinsip-prinsip universalitas dan lingkup ideologinya yang luas, yang menunjukkan kerangka kerja yang melampaui batas geografis konvensional. Konsep ruang politik Islam, yang memiliki fondasi sejarah dan teologis, sering kali berbeda dengan model kedaulatan nasional yang terpisah di Westphalia. Model Westphalia mencerminkan pengalaman sosial-politik yang lebih luas sebelum globalisasi (Salvatore, 2007).

Penekanan Al-Qur'an pada Ummah, atau komunitas global yang bersatu, yang secara

teoritis melampaui perbedaan ras dan nasional, semakin memperparah ketegangan antara ideologi Islam yang berorientasi internasional dan paradigma negara-bangsa modern ini. Menurut Naazer (2018), para akademisi Muslim sering memiliki pandangan kritis terhadap negara-bangsa karena perspektif ini. Mereka berpendapat bahwa pembagian teritorial seperti ini merusak persatuan Islam dan menempatkan umat Islam dihadapan eksploitasi luar. Oleh karena itu, fondasi ideologis ini menantang organisasi normatif negara-bangsa secara keseluruhan, terutama ketika diterjemahkan oleh organisasi kontemporer tertentu (Kaneva & Stanton, 2020).

Selanjutnya, perspektif supranasionalis Islam, yang berakar pada ayat-ayat Al-Qur'an yang menekankan satu komunitas global, berbeda prinsip kedaulatan teritorial yang

dilindungi oleh perjanjian internasional seperti Perdamaian Westphalia dan Pasal 2 Piagam PBB (Khelghat-Doost, 2023). Ketegangan ini menunjukkan bahwa mendamaikan universalisme Islam dengan sistem negara modern adalah masalah yang sulit. Selain itu, orientasi politik Sayyid Qutb, yang membedakan antara kedaulatan Tuhan dan sistem manusia, menantang pemahaman sekuler tentang kedaulatan dan ketertiban. Ini membuat Islam sebagai ideologi transnasional yang mengubah hubungan antara agama dan kekuasaan (Paipais, 2018). Dengan munculnya perspektif keagamaan dalam ilmu politik, perspektif ideologis ini semakin rumit.

### Definisi Transnasionalisme

Perbandingan historis antara Islam dan Katolik Roma sebagai fenomena "trans-peradaban" mendukung perspektif definisi transnasionalisme ini (Sarbini & Effendi, 2020). Kedua agama menawarkan teologi universal dan memiliki peran politik yang signifikan dalam berbagai konteks nasional dan internasional. Paralel ini menunjukkan bagaimana sistem kepercayaan universalis seperti itu dapat berdampak besar pada institusi politik dan standar masyarakat. Hal ini sering menantang atau mengubah paradigma negara-sentris (Haynes, 2022).

Ideologi seperti ini seringkali bertentangan sistem Westphalia yang berpusat pada kedaulatan negara-bangsa, dengan mendorong model pemerintahan alternatif yang melampaui batas nasional (Garofalo, 2006). Munculnya kembali agama sebagai kekuatan global yang kuat, khususnya Islam, sering berlawanan dengan paradigma negara-bangsa yang mapan, menyebabkan perdebatan besar tentang bagaimana identitas agama transnasional sesuai dengan struktur politik kontemporer (Jong, 2023). Sebenarnya, gerakan-gerakan tersebut memiliki tujuan yang jelas ketika mereka menentang intervensi negara dalam bidang seperti pendidikan atau kebijakan keluarga, atau menantang korupsi pemerintah; ini menunjukkan hubungan yang berkembang antara ideologi agama transnasional dan tata kelola nasional (Garofalo, 2006).

Keterlibatan yang selalu berubah ini sering menggambarkan bagaimana universalisme agama dapat menjadi reaksi politik terhadap hegemoni global yang dirasakan dan penutupan penentuan nasib sendiri politik (Tutt, 2023). Resistensi ini adalah hasil dari "glokalisasi", yaitu

penerapan ajaran agama global kedalam konteks lokal, menghasilkan agen politik-keagamaan transnasional yang berbeda (della Porta & Keating, 2008). Selain itu, untuk memahami jangkauan global dan dinamika yang berkembang, deterritorialisasi sistem agama Islam diperlukan, yang didorong oleh elemen seperti migrasi dan media (Medina, 2020).

### Konsep Ideologi Transnasional

Menurut definisinya, ideologi transnasional berarti melampaui batas negara dan berusaha memobilisasi individu dan kelompok di berbagai lanskap geopolitik dengan tujuan dan keyakinan yang sama. Hal ini sering kali melibatkan gagasan penerapan universal, yang bertujuan untuk menyatukan orang-orang dari berbagai negara berdasarkan ideologi yang sama, bukan batas geografis atau kesetiaan nasional. Menurut Ayatollah Khomeini, "Islam datang untuk kemanusiaan" (Khelghat-Doost, 2023), penekanan pada "Ummah", sebuah komunitas Muslim global yang melampaui perbedaan etnis dan nasional, adalah inti dari gagasan ini dalam konteks Islam. Menurut Mohammed (2024), perspektif teologis ini sejalan dengan gagasan bahwa Islam menyediakan perspektif dunia yang komprehensif, menyatukan umat manusia di bawah satu sistem hukum yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah, melampaui perbedaan geografis dan nasional.

Namun, keinginan universalistik ini sering bertentangan dengan struktur negara modern. Sayyid Qutb, misalnya, menentang kerangka negara-bangsa untuk membentuk masyarakat Islam global yang tidak terbatas geografis (Rock-Singer, 2022). Oleh karena itu, struktur ini menimbulkan konflik alami antara tuntutan identitas agama universal dan kebutuhan teritorial kedaulatan negara. Ini mencerminkan perselisihan sejarah antara negara-negara baru dan Gereja Katolik di Eropa pada abad pertengahan (Buzan, 2004).

Paralel sejarah ini menunjukkan masalah abadi yang ditimbulkan oleh ideologi yang mencoba menyatukan orang-orang yang beragam dalam satu sistem kepercayaan yang menyeluruh, yang seringkali bertentangan dengan sistem politik yang sudah ada. Interaksi antara postulasi agama universalistik dan formasi politik modern semakin diperumit oleh perkembangan historis istilah "negara" dalam wacana Islam, yang tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan sumber-sumber

Islam awal dalam arti modernnya (Feyyaz, 2013). Ketentuan ini menunjukkan perbedaan fundamental dalam pemikiran politik Islam dan teori politik Barat, terutama tentang bagaimana dan dimana kekuasaan politik. Misalnya, gerakan Salafi berusaha mengarahkan kembali rasa memiliki umat beriman dari afiliasi lokal dan teritorial ke ruang Islam yang abstrak dan tidak teritorial, menantang negara-negara dari dalam (Pall, 2024). Reorientasi ini memerlukan pemusnahan identitas dan kesetiaan nasional yang sudah ada. Ini akan mengutamakan pembentukan komunitas imajiner yang memprioritaskan kepatuhan terhadap hukum Islam dan proyek politik kolektif daripada ikatan etnis atau teritorial.

## Konsep Islam sebagai Ideologi Transnasional

Menurut Arigita (2020), konsep "Ummah", yang menunjukkan komunitas Muslim di seluruh dunia yang bersatu oleh iman daripada batas nasional atau teritorial, adalah dasar dari perdebatan tentang Islam sebagai ideologi yang melampaui batas nasional. Identitas menjadi tidak teritorial, yang menyebabkan dinamika yang kompleks antara identitas agama dan kedaulatan negara. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kesetiaan kepada komunitas Muslim global sering kali lebih penting daripada kesetiaan kepada negara-bangsa tertentu (Galal & Fibiger, 2020).

Ini semakin rumit karena fundamentalisme Islam, yang seringkali mendukung "ummah" global yang menantang sistem negara-bangsa Westphalia dan menganggap kewarganegaraan global berdasarkan iman daripada kebangsaan (Iqbal & Zulkifli, 2016). Konsep ini bertolak belakang dengan pemahaman konvensional tentang kewarganegaraan karena menawarkan kesetiaan yang didasarkan pada keyakinan agama yang melintasi batas geografis. Kerangka kerja seperti ini sering menghasilkan kenyataan atas kewarganegaraan *post*-nasional, dimana orang diatur oleh hukum Islam secara keseluruhan daripada aturan negara tertentu (Iqbal & Zulkifli, 2016).

Selain itu, penolakan terhadap batasan teritorial dalam konteks Islam menunjukkan keinginan terus-menerus untuk membangun tatanan moral dan hukum universal yang berfungsi diluar batas negara (Iqbal, 2017). Oleh karena

itu, dari sudut pandang ini, Islam dianggap sebagai ideologi yang pada dasarnya bersifat transnasional karena ajarannya dan manifestasi historisnya menunjukkan keinginan yang konsisten untuk komunitas umat Islam yang bersatu di seluruh dunia (Garofalo, 2006).

Sebaliknya, beberapa gerakan Islam mengejar kewarganegaraan global untuk "Ummah" dengan menantang model negara-bangsa. Namun, beberapa interpretasi mengakui bahwa negara dapat dibentuk berdasarkan etnis dan teritorial asalkan hukum Islam diterapkan di wilayah mereka (Iqbal & Zulkifli, 2016; Naazer, 2018). Meskipun demikian, interpretasi yang berbeda ini mendorong perdebatan tentang seberapa cocok universalisme Islam dengan struktur internasional kontemporer, di mana prinsip kedaulatan negara masih menjadi dasar (Atzori, 2013).

## Metodologi Studi Transnasionalisme Islam

Karena keanekaragaman sifat Islam transnasional, para peneliti sering menggunakan berbagai metode metodologis untuk meneliti manifestasi dan konsekuensi Islam secara menyeluruh. Untuk mengurai hubungan kompleks antara praktik lokal dan cita-cita Islam global, pendekatan ini sering kali menggabungkan studi kasus komparatif, penelitian etnografis, dan analisis teks kitab suci agama (Lacroix, 2005). Untuk memahami perkembangan transnasionalisme Islam, yang melacak perubahannya melintasi berbagai era dan konteks geopolitik, sangat penting untuk melakukan analisis historis. Metodologi yang beragam ini sangat penting untuk memahami bagaimana hukum Islam terintegrasi dalam sistem hukum nasional yang berbeda, mengingat pluralisme hukum yang sering terjadi (Karimullah, 2023).

Misalnya, analisis dapat menyelidiki bagaimana Syariah, sebagai sistem moral dan hukum yang lengkap, berinteraksi dengan kerangka hukum sekuler di negara-negara (Mohammed & Jureidini, 2022). Upaya untuk mendamaikan klaim universalistik yurisprudensi Islam dengan tuntutan spesifik terhadap sistem hukum dan kedaulatan nasional merupakan tantangan metodologis (della Porta & Keating, 2008). Ini termasuk melihat bagaimana berbagai mazhab hukum Islam memahami dan menerapkan hukum internasional, menunjukkan berbagai

perspektif terhadap tata kelola global dalam pandangan hukum Islam (Karimullah, 2023). Selain itu, para peneliti juga menggunakan humaniora digital untuk menganalisis wacana Islam di internet. Ini menawarkan pemahaman tentang bagaimana identitas Islam transnasional dibentuk dan diperdebatkan di dunia maya (Isbah & Wibawanto, 2021).

Selain itu, munculnya aktor non-negara yang termotivasi agama dan beroperasi lintas batas membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dasar ideologis yang mendorong tindakan transnasional mereka (Lakitsch, 2021). Banyak bentuk ekspresi transnasionalisme Islam, mulai dari organisasi bantuan kemanusiaan hingga kelompok militan, memiliki visi yang berbeda untuk solidaritas Islam global, yang membuat pemeriksaan ini semakin rumit (Lune & Berg, 2017). Pemanfaatan narasi keagamaan, yang mencakup kitab suci dan ajaran, memberi kita dasar ideal untuk memahami berbagai ekspresi ini (Lakitsch, 2021). Aktor Muslim sering menyesuaikan pesan mereka untuk audiens internal dan eksternal, menekankan motivasi keagamaan secara internal, dan menekankan hak asasi manusia universal dan anti-diskriminasi dalam wacana publik, yang membuat fenomena ini semakin rumit (Porta, 2014).

## Islam Sebuah Potensi Ideologi Transnasional

Gerakan jihadis transnasional yang memperjuangkan "ummah" global sering menggunakan interpretasi kalimah ini. Gerakan ini menghubungkan pengikutnya di seluruh dunia melalui ideologi bersama yang berasal dari ulama Islam terkemuka seperti Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab, dan Sayyid Qutb (Krause, 2022). Kelompok yang mendukung negara Islam diseluruh dunia sering menggunakan istilah "Ummah", terkadang menggunakan frase seperti "Pan-Islamisme" untuk mendapatkan dukungan sosial-politik untuk kampanye mereka (Bachtiar, 2018).

Perspektif ini melihat Islam sebagai sesuatu yang bersifat transnasional; doktrinnya membantu membangun masyarakat yang melampaui batas negara, berusaha untuk menciptakan tatanan Islam global (Murod et al., 2022). Fenomena historis dan terus-menerus dari komunitas Muslim minoritas di berbagai negara-bangsa mendukung konsepsi Islam sebagai ideologi

transnasional (Köroğlu & Brodard, 2024). Komunitas-komunitas ini sering memiliki hubungan budaya dan agama yang kuat dengan identitas Islam global yang lebih luas daripada hanya konteks nasional mereka sendiri. Hal ini telah menyebabkan perdebatan ilmiah yang berkelanjutan tentang apakah Islam, khususnya interpretasi tertentu, merupakan ideologi transnasional karena penekanannya pada masyarakat global dan klaim universalisiknya (Krause, 2022).

Studi akademis saat ini berfokus pada apakah ideologi Islam secara intrinsik mendorong tatanan politik universal atau apakah interpretasi seperti itu merupakan interpretasi selektif yang menyimpang dari ajaran inti (Bachtiar, 2018; Krause, 2022). Selain itu, gagasan bahwa "Ummah" adalah komunitas tunggal yang terdiri dari semua Muslim, melampaui perbedaan ras, etnis, atau nasional, mendukung argumen untuk pendekatan Islam yang universal. Namun, interpretasi ini tidak diterima secara luas. Banyak sarjana berpendapat bahwa istilah "Ummah" lebih sering merujuk pada persaudaraan spiritual daripada negara global (Bachtiar, 2018; Sumaktoyo, 2020). Namun, para pemimpin Islam radikal, termasuk Sayyid Qutb, telah secara luas memanfaatkan gagasan "Ummah" untuk mendukung entitas politik yang bersatu yang melampaui batas pemerintahan dan struktur negara konvensional, menekankan keyakinan sebagai faktor utama yang menentukan identitas dan kohesi kolektif (Nabavi, 2024). Menurut perspektif ini, iman Islam secara intrinsik mendorong identitas internasional, mengikat umat beriman dalam komunitas global melampaui kesetiaan mereka kepada negara bangsa masing-masing (Hamed, 2021).

## Karakteristik Ideologi Transnasional

Dalam kebanyakan kasus, ideologi transnasional menunjukkan sejumlah karakteristik penting. Salah satunya adalah bahwa itu mencakup secara universal lebih dari batas nasional tertentu, menekankan nilai dan tujuan bersama yang menyatukan berbagai kelompok orang, dan seringkali menantang kedaulatan teritorial negara-bangsa secara langsung atau tidak langsung (Ikenberry & Buzan, 2004; Schulz-Forberg et al., 2021). Dengan sikap universalis mereka, mereka dapat berinteraksi dengan orang-orang di berbagai konteks nasional, menumbuhkan

rasa identitas dan tujuan bersama yang melampaui perbedaan geografis.

Selain itu, ideologi-ideologi ini sering memanfaatkan teknologi komunikasi dan transportasi kontemporer untuk memudahkan pergerakan ide, dana, dan pengikut di seluruh dunia, memperkuat karakter transnasional mereka (Murod et al., 2022). Mereka berusaha membangun kerangka normatif yang melampaui sistem etika dan hukum nasional dan sering mendukung penataan ulang masyarakat global berdasarkan prinsip-prinsip dasar mereka (Schulz-Forberg et al., 2021). Misalnya, gerakan Islam tidak terbatas pada batas negara atau pemerintahan; mereka berusaha untuk memaksakan perspektif global mereka pada wilayah yang tidak terbatas oleh perbatasan teritorial yang ditetapkan secara hukum. Mereka seringkali mendukung penerapan syariah Islam secara menyeluruh sebagai cara untuk mencapai tatanan ilahi (Murod et al., 2022). Mengglobalisasi kerangka kognitif, menyebarkan gagasan dan visi mereka ke luar batas negara, dan seringkali dikaitkan dengan respons terhadap masalah sosial global yang dirasakan seringkali merupakan bagian dari tujuan ini (Iqbal & Zulkifli, 2016).

semakin menarik bagi banyak orang Muslim (Mauro, 2024). Memang, para ulama Islam abad

## Universalitas dan Domain dalam Teks Islam

Misalnya, Al-Qur'an Surat Al Mukminun 52

إِنَّ هَذِهِ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ

menyatakan,

إِنَّ هَذِهِ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ

, juga

﴿٥٢﴾ فَاعْبُدُونِ secara eksplisit mendorong identitas global umat Islam yang bersatu, melampaui pembagian geografis dan kesukuan. Menurut Medina (2020), penekanan kitab suci pada komunitas yang bersatu (Ummah) menggaris-bawahi landasan teologis universalisme (agama), yang berlawanan struktur nasionalistik. Selanjutnya, setelah nasionalisme pan-Arab sekuler memudar, terutama setelah Perang Enam Hari tahun 1967, gagasan "Ummah" sebagai komunitas global yang terdiri dari orang-orang beriman kembali muncul, menunjukkan pergeseran menuju identitas yang lebih luas dan universal. Penekanan kembali pada "Ummah" sebagai komunitas universal ini semakin diperkuat oleh kondisi dunia modern yang memungkinkan orang bergerak dan berpikir, menjadikan penanda identitas transnasional ini

Wahid Ridyawan, seperti Ibnu Taimiyah, mengakui perlebaran, bahwa "Ummah" memiliki sifat yang melampaui batas geografis dan dapat mencakup seluruh dunia, bahkan jika terdiri dari banyak negara (Naazer, 2018).

Menurut Al-Dakkak (2019), ayat-ayat Al-Qur'an sering kali menggambarkan tujuan Islam yang universal, menekankan bahwa itu berlaku untuk semua manusia, bukan hanya untuk kelompok etnis atau geografis tertentu. Perintah yang menuntut umat Islam untuk menyebarkan pesan Islam ke seluruh dunia, melampaui batas politik dan nasional konvensional, menunjukkan perspektif universalistik ini. Perintah-perintah Al-Qur'an seperti, misalnya, "Wahai manusia!" Kami membuatmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan membuatmu menjadi bangsa-bangsa dan suku-suku untuk membuatmu mengenal satu sama lain. "Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling takwa di antara kamu" (Mu-najat, 2023) menunjukkan kerangka inklusif yang menerima keragaman sambil mendorong ketakwaan sebagai ukuran utama nilai daripada afiliasi nasional atau suku.

Ayat-ayat tersebut sering ditafsirkan untuk menunjukkan bahwa umat Muslim dapat bersatu secara spiritual melampaui perbedaan geografis. Ini menunjukkan bahwa keyakinan bersama lebih penting daripada kewarganegaraan (Césari, 2016; Naazer, 2018). Konsep ini memberikan dasar teologis yang kuat untuk menganggap Islam sebagai ideologi transnasional karena ajarannya secara inheren mengadvokasi komunitas global yang dipersatukan oleh iman daripada perbedaan teritorial atau etnis. Menurut Myers (2006), pendekatan universalistik ini sering menyebabkan perdebatan tentang apakah negara Islam secara definisi harus beroperasi pada skala internasional. Ini terutama berlaku karena konteks historis kekhalifahan sebagai organisasi politik dan agama yang bersatu.

Namun, masalah kontemporer, seperti pembagian dunia Muslim menjadi beberapa negara, mempersulit penerapan nyata "Ummah" di seluruh dunia. Misalnya, Yusuf al-Qaradawi berpendapat tentang negara Islam global yang didasarkan pada gagasan "Ummah", yang tidak terbatas pada batas etnis atau teritorial dan terbuka untuk semua orang yang beriman tanpa paksaan (RAHMAN, 2020). Semangat misionaris Islam yang terus-menerus, yang bertujuan untuk menyebarkan pesan Al-Qur'an secara universal, membedakan Islam dari agama

lain dengan dorongan kuat untuk ekspansi dunia (Braibanti, 1985). Universalitas yang kuat ini, yang berakar pada kitab suci Islam dan interpretasi sejarah, telah menyebabkan perdebatan akademis yang berkelanjutan tentang pengaruhnya terhadap struktur politik modern dan penciptaan identitas Islam transnasional (Feyyaz, 2013; Williams, 2007).

## Debat Akademik dan Perspektifnya

Universalitas yang kuat ini, yang berakar kuat dalam kitab suci Islam dan interpretasi sejarah, telah menyebabkan perdebatan akademis yang berkelanjutan tentang pengaruhnya terhadap struktur politik modern dan pembentukan identitas Islam transnasional. Sarjana seperti Hallaq telah menggambarkan "Ummah" sebagai entitas yang melampaui batas nasional dan diatur oleh prinsip moral dan hukum. Perspektif ini menekankan perbedaan yang ada antara gagasan negara-bangsa modern dan gagasan Islam tradisional tentang komunitas yang beriman (Ahmad, 2010). Selain itu, definisi "Ummah" sebagai kelompok yang dibentuk oleh iman bersama daripada ikatan darah atau tanah, membedakannya dari komunitas lain dan memperkuat potensinya di luar batas negara (Al-Dakkak, 2019).

Akibatnya, diskusi sering kali berfokus pada bagaimana prinsip-prinsip universalistik "Ummah" ini dapat berinteraksi atau secara substansial menantang kedaulatan dan legitimasi negara-bangsa yang mapan, terutama di kalangan masyarakat Muslim (Naazer, 2018). Pasca-Khilafah, para teoritikus politik Muslim berdebat tentang posisi Islam dalam struktur negara-bangsa, dan modernitas menjadi referensi utama untuk kehidupan sosial dan keagamaan negara (Kaminski & Kaminski, 2025). Menurut Rahman (2020), perjuangan ini telah diinterpretasikan dalam berbagai cara, termasuk mendukung negara Islam di seluruh dunia dan menginterpretasikan ajaran Islam dalam konteks nasionalisme.

Namun, ada beberapa akademisi yang berpendapat bahwa kebanggaan dan identitas nasional, seperti afiliasi keluarga atau suku, adalah perasaan manusiawi yang diakomodasi oleh Islam, dan dapat digunakan untuk menyatukan orang menuju tujuan seperti pembentukan negara dan emansipasi nasional. Ini menantang gagasan bahwa universalisme secara inheren menghilangkan identitas nasional (Naazer,

2018). Namun, orang lain berpendapat bahwa universalisme Islam, yang dibentuk oleh konsep seperti "Ummah", secara alami menantang legitimasi model negara-bangsa dan mendukung komunitas non-teritorial yang lebih luas yang melampaui batas politik konvensional (Mohammed & Jureidini, 2022; Naazer, 2018).

## Masa Depan Ideologi Transnasional Didunia Modern

Ideologi transnasional, termasuk agama, akan semakin memanfaatkan saluran-saluran ini untuk penyebaran dan mobilisasi karena perkembangan platform digital dan konektivitas global yang berkelanjutan (Krause, 2022). Ini akan menimbulkan tantangan baru bagi tata kelola dan kohesi sosial. Karena aktor non-negara sekarang dapat memiliki pengaruh yang signifikan secara global tanpa batasan geografis, pendekatan tradisional yang berpusat pada negara terhadap ideologi harus dievaluasi ulang. Menurut Mohiuddin (2024), praktik ekonomi yang dikaitkan dengan gerakan ini juga menekankan hubungan antara ideologi dan ekonomi politik, yang berdampak pada transformasi masyarakat dan membuka peluang dan pengaruh baru. Seringkali dipandang negatif, Islam transnasional memerlukan pendekatan teoretis yang seimbang terhadap integrasi imigran yang mempertimbangkan konteks transnasional dan nasional (Dikici, 2021). Metode ini mengakui bahwa aspek afiliasi dan identitas internasional dapat secara signifikan memengaruhi hasil integrasi dan menantang kerangka kebijakan domestik yang murni (Aguilar, 2018). Untuk membuat respons kebijakan yang memahami konteks dan menyeluruh, sangat penting untuk memahami bagaimana ideologi transnasional ini meresap dan mengubah komunitas lokal (Stephens et al., 2024).

## Kesimpulan

Analisis diatas menunjukkan betapa rumit dan beragamnya ideologi Islam diluar batas nasional dan bagaimana hal itu berdampak besar pada stabilitas geopolitik, integrasi sosial, dan lanskap identitas global yang dinamis. Untuk membuat strategi yang efektif untuk menghadapi kompleksitas yang timbul dari ideologi-ideologi ini dan manifestasinya di dunia

yang semakin terhubung, pemahaman komprehensif ini sangat penting (Friedrichs, 2018). Ini menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih halus sangat diperlukan, melampaui kategorisasi yang disederhanakan, dan melibatkan interpretasi yang beragam dan penggunaan politik ajaran Islam dalam berbagai konteks. Secara khusus, ini melibatkan pengakuan terhadap keragaman internal dalam pemikiran Islam tentang transnasionalisme, karena interpretasi teologis tertentu secara inheren mendukung universalisme melalui konsep seperti doktrin "ummah" (Sarhini & Effendi, 2020).

Konsep pan-Islamisme tentang populasi Muslim diseluruh dunia melampaui batas negara, mendorong kerangka ideologis internasional (Garofalo, 2006). Namun, doktrin ini tidak secara otomatis menjadi agenda politik yang konsisten, karena penerapan praktisnya berbeda-beda di antara kelompok dan wilayah (Krause, 2022). Memang, berbagai pihak, mulai dari pemimpin politik hingga kelompok ekstremis, sering menggunakan istilah "ummah" untuk mendorong dukungan atau mendukung tindakan yang sesuai dengan rasa solidaritas Muslim yang lebih luas. Namun, interpretasi dari istilah ini sangat berbeda (Porta, 2014). Seruan strategis ini menekankan bahwa ideologi agama sangat fleksibel dan dapat diubah dan digunakan untuk berbagai tujuan politik dan sosial (della Porta & Keating, 2008).

## Referensi

1. Aguilar, A. S. (2018). Approaching the security-integration nexus. *HAL (Le Centre Pour La Communication Scientifique Directe)*. <https://hal.science/hal-03384680>
2. Al-Dakkak, K. (2019). Deconstructing the Political Umma: Mohamed Talbi on Discursive Shift and Political Islam. *The Muslim World*, 109(3), 278. <https://doi.org/10.1111/muwo.12291>
3. Arigita, E. (2020). Shari'a y ciudadanía en España: una propuesta para investigar los marcos normativos y la dimensión transnacional. *Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos*, 29, 6. <https://doi.org/10.15366/reim2020.29.002>
4. Atzori, D. (2013). The Political Economy of Oil and the Crisis of the Arab State System. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2292493>
5. Bachtiar, H. (2018). Towards a progressive interpretation of Ummah. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 8(1), 87. <https://doi.org/10.18326/ijims.v8i1.87-116>
6. Braibanti, R. (1985). Toward the Realization of Ummah. *American Journal of Islam and Society*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.35632/ajis.v2i1.2920>
7. Buzan, B. (2004). From international to world society?: English school theory and the social structure of globalisation. *Choice Reviews Online*, 42(4), 42. <https://doi.org/10.5860/choice.42-2459>
8. Césari, J. (2016). Disciplining religion: the role of the state and its consequences on democracy. *Journal of Religious and Political Practice*, 2(2), 135. <https://doi.org/10.1080/20566093.2016.1181365>
9. della Porta, D., & Keating, M. (2008). How many approaches in the social sciences? An epistemological introduction. In *Approaches and Methodologies in the Social Sciences: A Pluralist Perspective*. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511801938.003>
10. Dikici, E. (2021). Integration, transnationalism and transnational Islam. *Identities*, 29(6), 863. <https://doi.org/10.1080/1070289x.2021.1883258>
11. Feyyaz, M. (2013). Faith, Reason and Statecraft in Contemporary Islam: Interpretations, Interface and Distortions. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 3(1), 76. <https://doi.org/10.32350/jitc.31.04>
12. Friedrichs, J. (2018). Intermestic security challenges: Managing transnational bonds. *European Journal of International Security*, 3(2), 162. <https://doi.org/10.1017/eis.2017.19>
13. Galal, E., & Fibiger, T. B. (2020). Politisk bev-idstthed blandt arabiske migranter i Europa : Medieret diaspora og religion. *Research Portal Denmark*, 14(1). <https://local.forskningsportal.dk/local/dki-cgi/ws/cris-link?src=ku&id=ku-acaf5502-6678-486f-a7cc-54304686173c&ti=Politisk%20bev-idstthed%20blandt%20arabiske%20migranter%20i%20Europa%20%3A%20Medieret%20diaspora%20og%20religion>
14. Garofalo, G. (2006). How Does Transnational Islamist Terrorism Challenge The Conceptions Of Inter National Security? *DergiPark (Istanbul University)*. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tyir/issue/49998/640905>
15. Haynes, N. (2022). Presidents, priests, and prophets: covenantal Christian nationalism and the challenge of biblical analogy. *Journal of the*

- Royal Anthropological Institute*, 29(1), 85.  
<https://doi.org/10.1111/1467-9655.13866>
16. Ikenberry, G. J., & Buzan, B. (2004). From International to World Society? English School Theory and the Social Structure of Globalisation. *Foreign Affairs*, 83(6), 144.  
<https://doi.org/10.2307/20034153>
  17. Iqbal, A. M., & Zulkifli, Z. (2016). Islamic fundamentalism, nation- state and global citizenship: the case of Hizb ut-Tahrir. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 6(1), 35.  
<https://doi.org/10.18326/ijims.v6i1.35-61>
  18. Iqbal, R. (2017). MacIntyre, Ricoeur and Iqbal on Pakistan's Identity Crisis: A Muslim Critique. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 7(1), 89. <https://doi.org/10.32350/jitc.71.06>
  19. Isbah, M. F., & Wibawanto, G. R. (2021). *Perspektif Ilmu-Ilmu Sosial di Era Digital: Disrupsi, Emansipasi dan Rekognisi*.
  20. Jong, A. (2023). Modern episteme, methodological nationalism and the politics of transnationalism. *Frontiers in Political Science*, 5.  
<https://doi.org/10.3389/fpos.2023.1172393>
  21. Jong, A., & Ali, R. (2023). Political Islam as an Incomplete and Contested Category: A Post-Foundationalist Revision. *Religions*, 14(8), 980.  
<https://doi.org/10.3390/rel14080980>
  22. Kaminski, J., & Kaminski, J. (2025). Operationalizing Ummatic Soft Power: Criteria for Effective Collaboratives. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5788742>
  23. Kaneva, N., & Stanton, A. L. (2020). An Alternative Vision of Statehood: Islamic State's Ideological Challenge to the Nation-State. *Studies in Conflict and Terrorism*, 46(5), 640.  
<https://doi.org/10.1080/1057610x.2020.1780030>
  24. Karimullah, S. S. (2023). From Tradition to Mainstream: Understanding the Integration of Islamic Law in Various Global Settings. *Justicia Islamica*, 20(2), 214.  
<https://doi.org/10.21154/justicia.v20i2.6478>
  25. Khelghat-Doost, H. (2023). FOREIGN PÓLCY OF POST-REVOLUTIONARY IRAN: EXPEDIENCY AT THE CROSSROAD OF SUPRA-NATIONALISM AND SOVEREIGNTY. *Austral Brazilian Journal of Strategy & International Relations*, 11(22).  
<https://doi.org/10.22456/2238-6912.116576>
  26. Krause, D. (2022). Expansion or Failure? : Patterns of Transnational Jihadist Conflict. *Research Portal Denmark*, 117. <https://local.forskingsportal.dk/local/dki-cgi/ws/cris-link?src=au&id=au-003d588b-ccc3-45f4-b5d0-6164bc376f27&ti=Expansion%20or%20Failure%3F%20%3A%20Patterns%20of%20Transnational%20Jihadist%20Conflict>
  27. Krause, D., & Sheikh, M. K. (2022). Perspectives on terrorism : Special issue: containing transnational jihad. In *Research Portal Denmark* (Vol. 16, Issue 1, p. 186). Technical University of Denmark. <https://local.forskingsportal.dk/local/dki-cgi/ws/cris-link?src=diis&id=diis-8901a2aa-574b-401f-a7ef-82b691186bdc&ti=Perspectives%20on%20terrorism%20%3A%20Special%20issue%3A%20containing%20transnational%20jihad>
  28. Lacroix, S. (2005). Post-Wahhabism in Saudi Arabia? *HAL (Le Centre Pour La Communication Scientifique Directe)*. <https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-03571577>
  29. Lakitsch, M. (2021). Understanding Conflicts with Religious Dimensions in their Transnational Interrelations. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3765261>
  30. Lune, H., & Berg, B. L. (2017). *Qualitative Research Methods for The Social Sciences*.
  31. Mandaville, P. M., & Hamid, S. H. (2018). *Islam as statecraft: How governments use religion in foreign policy*. <https://doi.org/10.15868/socialsector.40709>
  32. Martill, B. (2017). International ideologies: paradigms of ideological analysis and world politics. *Journal of Political Ideologies*, 22(3), 236.  
<https://doi.org/10.1080/13569317.2017.1345139>
  33. Martill, B. (2018). International ideologies: paradigms of ideological analysis and world politics. In *Routledge eBooks* (p. 124). Informa. <https://doi.org/10.4324/9781351234504-9>
  34. Mauro, N. D. (2024). Global Islam and Local Action. *Journal of Arabic and Islamic Studies*, 23(2), 141. <https://doi.org/10.5617/jais.10870>
  35. Medina, A. (2020). NARRATIVAS DE IDENTIDAD ISLÁMICA: UNIVERSALISMO, LATINIDADES Y NACIONALISMOS PARA EL CASO DE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS. *Cultura y Religión*, 14(1), 142.  
<https://doi.org/10.4067/s0718-47272020000100142>
  36. Mohammed, H., & Jureidini, R. (2022). Umma and the nation-state: dilemmas in refuge ethics. *Journal of International Humanitarian Action*, 7(1). <https://doi.org/10.1186/s41018-022-00124-z>
  37. Mohammed, S. S. (2024). Islamic View towards International Relations. *Indonesian Journal of Islamization Studies*, 1(2), 172.  
<https://doi.org/10.21111/injas.v1i2.10472>
  38. Mohiuddin, A. (2024). Islamism and Globalisation: Unpacking the Dialectics of Ideology and Socio-economic Change in the Middle East.

- Journal of Globalization Studies*, 15(1), 180.  
<https://doi.org/10.30884/jogs/2024.01.10>
39. Munajat, M. (2023). Breeding terrorism: an anomie's anatomy of the terrorism in Indonesia. *IJoReSH Indonesian Journal of Religion Spirituality and Humanity*, 2(2), 114.  
<https://doi.org/10.18326/ijores.v2i2.114-135>
  40. Murod, M., Sulastri, E., Gunanto, D., Sahrasad, H., & Mulky, M. A. (2022). Islam and the state: Indonesian mosque administrators' perceptions of Pancasila, Islamic sharia and transnational ideology. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 78(4).  
<https://doi.org/10.4102/hts.v78i4.7382>
  41. Myers, J. C. (2006). Review Essays: The Quranic Concept of War. *The US Army War College Quarterly Parameters*, 36(4).  
<https://doi.org/10.55540/0031-1723.2334>
  42. Naazer, M. A. (2018). Islamic Universalism and the Nation State. *Liberal Arts and Social Sciences International Journal (LASSIJ)*, 2(2), 29. <https://doi.org/10.47264/idea.lassij/2.2.4>
  43. Nabavi, S. A. (2024). ISIS AND THE COVID-19 PANDEMIC: CONTINUATION OF THE PERENNIAL BATTLE BETWEEN GOOD AND EVIL. *International Journal of Asia Pacific Studies*, 20(1), 1.  
<https://doi.org/10.21315/ijaps2024.20.1.1>
  44. Paipais, V. (2018). Introduction: Political Theologies of the International—the continued relevance of theology in international relations. *Journal of International Relations and Development*, 22(2), 269.  
<https://doi.org/10.1057/s41268-018-0160-2>
  45. Pall, Z. (2024). Can the umma replace the nation? Salafism, home-making and the territorial nation-state. *Hau Journal of Ethnographic Theory*, 14(1), 120. <https://doi.org/10.1086/729820>
  46. Pall, Z., & Koning, M. de. (2017). Being and Belonging in Transnational Salafism. *Journal of Muslims in Europe*, 6(1), 76.  
<https://doi.org/10.1163/22117954-12341338>
  47. Porta, D. D. (2014). *Methodological Practices in Social Movement Research*.
  48. RAHMAN, H. (2020a). TOWARD A WISE POLITICAL FIQH: THE PERCEPTION OF STATE IN THE POLITICAL THOUGHT OF YUSUF AL-QARADAWI. *DergiPark (Istanbul University)*. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/asbider/issue/56888/798770>
  49. RAHMAN, H. (2020b). TOWARD A WISE POLITICAL FIQH: THE PERCEPTION OF STATE IN THE POLITICAL THOUGHT OF YUSUF AL-QARADAWI. *Akademi Sosyal Bilimler Dergisi*, 7(21), 6.  
<https://doi.org/10.34189/asbd.7.21.001>
  50. Rock-Singer, A. (2022). The Rise of Islamic Society: Social Change, State Power, and Historical Imagination. *Comparative Studies in Society and History*, 64(4), 994.  
<https://doi.org/10.1017/s0010417522000317>
  51. Salvatore, A. (2007). The Exit from a Westphalian Framing of Political Space and the Emergence of a Transnational Islamic Public. *Theory Culture & Society*, 24(4), 45.  
<https://doi.org/10.1177/0263276407080092>
  52. Sarbini, A., & Effendi, D. I. (2020). Self-Education Mechanism and Community Strengthening: Understanding Da'wa as Formalized Ritual of Tablighi Jemaat. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 55(5).  
<https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.55.5.21>
  53. Schulz-Forberg, H., Sheikh, M. K., & Svensson, I. (2021). Transnational Studies of Conceptual Change. *Research Portal Denmark*, 203. <https://local.forskingsportal.dk/local/dki-cgi/ws/cris-link?src=au&id=au-e765ee8b-ca3e-47b0-8948-a8ccd9f0dc8d&ti=Transnational%20Studies%20of%20Conceptual%20Change>
  54. Stephens, W., Steden, R. van, & Schoonmade, L. (2024). Boundary Spanning in Local Governance: A Scoping Review [Review of *Boundary Spanning in Local Governance: A Scoping Review*]. *Administration & Society*, 56(2), 99. SAGE Publishing.  
<https://doi.org/10.1177/00953997231219262>
  55. Sumaktoyo, N. G. (2020). Faith and Friendship: Religious Bonding and Interfaith Relations in Muslim Countries. *Politics and Religion*, 14(4), 634.  
<https://doi.org/10.1017/s1755048320000589>
  56. Tutt, D. (2023). A Caliphate of Ideas? Islamic Politics in Dialogue with Contemporary Marxism. *ReOrient*, 8(1). <https://doi.org/10.13169/reorient.8.1.0057>
  57. Williams, R. H. (2007). The Languages of the Public Sphere: Religious Pluralism, Institutional Logics, and Civil Society. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 612(1), 42.  
<https://doi.org/10.1177/0002716207301140>